

## DAFTAR BACAAN

- DEPHUT RI, Seminar Nasional September 2007, "Status Kepemilikan lahan pada kawasan pantai dan hutan mangrove",  
[http://www.dephut.go.id/informasi/rrl/sts\\_mangrove.htm](http://www.dephut.go.id/informasi/rrl/sts_mangrove.htm)
- Hadjon, Philipus M., 'Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia', Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hajati, Sri, 'Penyederhanaan Macam Hak Atas Tanah', Majalah Yuridika, Volume 21 No.3, Mei 2006, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
- Harsono, Budi, Hukum Agraria Indonesia, "Sejarah Pembentukan UUPA, Isi, dan Pelaksanaannya", Djambatan, Jakarta, 1994.
- \_\_\_\_\_, "Undang-Undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan Isi dan Pelaksanaannya", Djambatan, Djakarta, 1971.
- Hartono, Sunaryati, 'Penelitian Hukum Di Indonesia Abad ke-20', alumni, Bandung, 1994.
- Kadarisman, Sugiri. "Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Undang-undang Hak Tanggungan". Makalah Seminar. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Trisakti Bekerjasama dengan Kanter Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional dan BPP Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, 10 April 1996.
- Marzuki, Peter Machmud, 'Kerangka Pemikiran Hukum dalam Ekonomi Pasar', Makalah Program Pascasarjana (PPs) Universitas Airlangga, Surabaya. 1997.
- Mertokusumo, Soedikno, 'Hukum dan Politik Agraria', Universitas Terbuka, Karunika, Jakarta, 1988.
- Numberi, Freddy, Menteri Kelautan dan Perikanan, "Sarana Integrasikan Wilayah Pesisir", Sosialisasi Undang-undang No.27 tahun 2007 di Jakarta (6/8/2007),
- Parlindungan, A. P. "Beberapa Konsep Tentang Hak-hak atas Tanah". Majalah CSIS Edisi Tahun XX Nomor 2, Jakarta : Maret-April 1991.
- Perangin, Effendi, 'Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Fraktisi Hukum', Rajawali, Jakarta, 1989.

Santoso, Urip, "Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah", Prenada Media, Jakarta, 2005.

\_\_\_\_\_, "Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli", Majalah Yuridika Volume 17, no.5, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, September 2002.

\_\_\_\_\_, "Hak Atas Tanah Sebagai Obyek Hak Tanggungan Dan Mekanisme Pembebanannya", Era Hukum, 2000.

Sumardjono, Maria S.W., "Aspek Teoritis Peralihan Hak Atas Tanah Menurut UUPA", Majalah Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, No. 18/X/93, Yogyakarta, 1993.

Soegiarto, I. "Hak Pakai Atas Tanah Negara". Jurnal Hukum Bisnis. Volume I. Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1997.

Suhana, "Lima Persoalan Hak Perairan Pesisir," peneliti pada Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan (PKSPL-IPB), Sinar Harapan, Jumat 15 Juni 2007.

Wignjosoebroto, Soetandyo, "Kebijakan negara untuk mengakui atau tidak mengakui eksistensi masyarakat Adat berikut Hak Atas Tanahnya", Makalah disampaikan pada diskusi Meja Bundar Hak-hak Masyarakat Adat Atas Tanah dalam Konteks Kebijakan Pertanahan Orde Baru, diselenggarakan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 21 Oktober 1996.

Yulis, Herma, "Aspek-aspek Hukum Hak pakai Atas Tanah Negara sebagai Objek Jaminan", Hukum Bisnis, Jakarta, vol. 10, 2000.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia.**

**Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA).**

**Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun.**

**Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.**

**Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Pokok-Pokok Perairan**

**Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

**Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005--2025.**

**Undang-undang No.27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP PPK).**

**Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.**

**Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Kebijakan Selanjutnya.**

**Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal.**

**Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.**

**Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria/Kepala BPN) Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.**

**Permen Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.**